



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GIRI HARYAJI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
3. NHK : 754006

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.655.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m²/200 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/40 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 2962 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 525.000.000
4. Tanah Seluas 2914 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 3400 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 530.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 91.700.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1986, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.200.000
2. MOTOR, HONDA BEATSTREET Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000



6. MOTOR, U WIN FLY LISTRIK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	551.512.068
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.332.212.068
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.332.212.068

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.